

INTERVENSI KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK KOSOVO

Oleh : Indro Dwi Haryono

Pendahuluan

Seperti yang telah kita ketahui, konflik selalu saja terjadi di berbagai belahan bumi manapun di dunia. Konflik adalah hubungan antara dua pihak baik individu atau kelompok yang memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan¹. Konflik juga dapat dikatakan sebagai sebuah keadaan yang terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok². Konflik yang sudah pernah terjadi di dunia, dan seperti kita ketahui bersama antara lain adalah, Konflik Rwanda, konflik Bosnia-Herzegovina, konflik Kosovo dan lain-lain. Dari dua definisi tersebut, paper ini akan mencoba memaparkan konflik yang terjadi di Kosovo beberapa waktu yang lalu.

Konflik di Kosovo terjadi karena adanya usaha melenyapkan etnis Albania yang merupakan etnis minoritas oleh etnis Serbia yang merupakan etnis mayoritas. Fanatisme dari etnis Serbia muncul tidak lepas dari usaha seorang tokoh antagonis di panggung sandiwara dunia, Presiden Yugoslavia Slobodan Milosovic yang beretnis Serbia. Presiden Yugoslavia memimpikan sebuah "Serbia Raya", dan karena etnis Albania yang merupakan etnis minoritas dengan latar belakang mayoritas beragama Islam ingin memisahkan diri dengan etnis Serbia yang mayoritas dengan latar belakang mayoritas beragama Katolik. Slobodan Milosevic dengan segera mengadakan aksi kekerasan dengan kekuatan militer untuk menanggulangi pemisahan diri etnis Albania.

Konflik yang terjadi di berbagai belahan bumi di dunia tersebut juga tidak luput dari intervensi (campur tangan) asing di luar pihak-pihak yang bersangkutan. Paper ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul atas intervensi asing tersebut, yang meliputi:

1. Bagaimana konflik etnis tersebut kembali terjadi?
2. Siapa aktor intervensi dalam konflik Kosovo?
3. Bagaimana intervensi itu terjadi?
4. Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya intervensi dalam konflik Kosovo?
5. Dampak apa saja yang ditimbulkan dari terjadinya konflik Kosovo pra dan paska intervensi asing?

¹. Hand-out mata kuliah Teori-teori Konflik, Fauzan, SIP, M.Si.

² Hand-out mata kuliah Perang dan Damai, Fauzan, SIP, M.Si.

Bagian akhir paper ini akan berusaha menyimpulkan isi dari paper ini.

Latar Belakang Kembali Munculnya Konflik Etnis

Setelah kematian Tito pada tanggal 4 Mei 1980, ketegangan anatar etnis muncul kembali. Konflik etnis yang terakumulasi pada paruh 1970-an mulai meledak, setelah sekian lama berhasil ditekan pada masa kekuasaan Tito. Meninggalnya Tito telah menciptakan situasi vacuum politik di Yugoslavia dan menunjukkan bahwa setabilitas negara Yugoslavia bergantung sepenuhnya pada kemampuan pemimpin kharismatik dalam harmonisasi hubungan antar etnik. Kekerasan etnik yang terjadi di kosovo awal tahun 1981, merupakan fenomena awal konflik anatr etnik sepeninggalan Tito yang paling krusial bagi stabilitas Yugoslavia. Terjadi unjuk rasa yang meluas di Kosovo oleh kelompok nasional Albania yang menuntut peningkatan status Kosovo menjadi republik penuh.

Unjuk rasa yang di lakukan oleh mahasiswa di Universitas Pristina bulam maret 1981 secara cepat menyulut demonstrasi secara luas dan aksi kekerasan melanda seluruh wilayah propinsi, menyebabkan bentrok serius antara etnis Albania dengan aparat keamanan. Seluruh wilayah Kosovo di tutup dan keadaan darurat diumumkan. Pemerintah Serbia melakukan 'unjuk' kekuatan militer di seluruh wilayah Kosovo, pasukan anti huru hara di turunkan untuk meredakan suasana. Seluruh institusi pendidikan di wilayah ini tutup.

Demonstrasi yang semangkin meluas terjadi pada bulan Maret 1982. Ketegangan dan kerusuhan meluas ke wilayah Montenegro dan Macedonia. Pada aakhir juli 1980, sekitar 2.000 etnik Serbia dan Montenegro berencana melakukan longmarch dari Kosovo menuju Beograd untuk melakukan protes terhadap kegagalan pemerintah federal dalam menghentikan aksi kekerasan kelompok nasionalis Albania. Tapi aksi protes itu di hentikan oleh pemerintah setempat. Ratusan etnik Serbia dan Montengro mengungsi keluar meninggalkan Kosovo, dengan jumlah total pengungsi sebesar 22.000 orang pada tahun 1987.

Konflik di Kosovo mencapai puncaknya pada tahun 1989. Terjadi demonstrasi besar-besaran yang di lakukuakan etnis Albania sebagai rasa kekecewaan terhadap Serbia. Kosovo merasa otonomi propinsinya banyak di kurangi semenjak Serbia dipimpin oleh Slobodan Milosevic. Kerusuhan etnis memuncak ketika di syhkanya amandemen undang-undang dasar republik Serbia, yang menyatakan bahwa otonomi Kosovo berada dibawah pengawasan pemerintah republik Serbia (Maet 1989). Padahal sebelum diubah (berdasarkan konsitusi 1974), Serbia tidak punyai wewenang terhadap propinsi otonominya. Kerusuhan yang terjadi menimbulkan jatuhnya korban sebanyak 100

orang meninggal dari etnis Albania (termasuk dua polisi) dan lebih dari 254 militan Albania di tangkap dalam Bulan Februari 1990 setelah terjadi kerusuhan.³

Setelah itu, di Kosovo sisa-sisa gerakan yang menghendaki pemerintahan sendiri secara perlahan berhasil di lenyapkan antara tahun 1989-1990, ketika Milosevic menekan Dewan Kosovo dan memenjarakan wakil-wakilnya. Pendudukan Serbia ini di tandai dengan tersingkirnya etnik Albania dari posisi-posisi yang mereka duduki sebelumnya. Walaupun penduduk etnik Serbia di Kosovo hanya kurang dari 10 % tetapi Milosevic memaksakan agar bahasa Serbo-Kroasia sebagai bahasa resmi di Kosovo. Untuk itu penguasa Serbia membubarkan semua sekolah-sekolah lanjutan yang menggunakan bahasa Albania dan memberhentikan tidak kurang dari 6.000 guru etnik Albania.

⁴ Dalam hal kerusuhan etnis di Kosovo, pihak Kroasia dan Slovenia melancarkan kecaman keras atas pengambilalihan kekuasaan Kosovo oleh Serbia dan menuduh Serbia melanggar hak-hak asasi penduduk kosovo untuk bebas menentukan nasibnya sendiri.⁵ Kroasia dan Slovenia mengkhawatirkan tindak tanduk Serbia atas Kosovo yang di dasarkan sebagai ancaman dari suku terbesar terhadap suku minoritas, apalagi mengingat usah Serbia dalam melakukan amandemen terhadap hegemoni Serbia atas republik-republik lainnya.

Usaha Serbia untuk membatalkan ketentuan-ketentuan konsitusi telah meninggalkan kekhawatiran republik-republik lainnya. Jelas bahwa perubahan konsitusi nasional tersebut untuk memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah pusat yang berarti pula akan mengurangi kebebasan republik-republik lainnya.

Dukungan Kroasia dan Slovenia terhadap etnis Albania telah meninggalakan ketegangan hubungan antara Kroasia dan Slovenia di satu pihak dengan Serbia dan Montenegro di lain pihak, seperti ketika terjadi perang pers Serbia dan Montenegro melawan pers Kroasia dan Slovenia. Pihak Serbia dan Montenegro menuduh di balik dukungan Kroasia dan Slovenia terhadap gerakan irredenta etnis Albania itu tersembunyi maksud kedua republik ini untuk menegaskan atau menguji kedaulatan pemerintahan federal untuk memungkinkannya memisahkan diri dari Yugoslavia, kemudian hari jika diperlukan. Bersamaan dengan itu, hubungan politik, cultural, dan akademik antara kedua belah pihak juga mengalami kemandekan.

Persengketaan ini mencapai puncaknya ketika pemerintah Slovenia tidak mengijinkan diadakannya pertemuan massal oleh etnis Serbia dan Montenegro asal Kosovo yang akan dilaksanakan tanggal 1 Desember 1989 di Ljubljana, ibukota Slovenia, yang mana dimaksudkan bagi

³. Ensiklopedi Indonesia Suplemen 1990, Pt. Lehtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta 1990, hal 576.

⁴ . Dari konflik pasca Perang Dingin : Studi Kasus Yugoslavia, Laporan Penelitian FISIP UGM Yogyakarta, 1996. hal. 35-36.

⁵. Laporan Tahunan KBRI di Beograd II 1989/1990. hal. 128.

rancangan kembalinya etnis Serbia dan Montenegrino itu ke Kosovo setelah merdeka pindah dari sana sejak tahun 1980-an. Selanjutnya pemerintahan Slovenia mengambil langkah-langkah pengamanan untuk mencegah pertemuan massal itu dengan menggerakkan polisi dan militernya ke daerah perbatasan Slovenia.

Lebih lanjut lagi, pertikaian antar etnis telah mengakibatkan terjadinya pertentangan antar gereja. Ditangkapnya para militan Kroasia atas serangkaian tindak kerusuhan tahun 1980-an menyebabkan pertentangan kembali antara Gereja Katholik Kroasia dengan pemerintahan federal terutama Serbia. Pertentangan agama yang mulai tumbuh sejak abad 11 itu tetap mengakar kuat bahkan menjalar dalam bidang kehidupan politik dan sosial. Kroasia dan Slovenia secara historis memang telah memiliki perbedaan mendasar dengan Serbia yang tidak jarang menjadi bahan perselisihan. Gereja Kristen Ortodoks Serbia yang pro pemerintahan selalu bertentangan dengan Gereja Katholik Roma yang berada di Kroasia dan Slovenia yang sering menyarankan anti pemerintah.

Selain itu, sosialisasi antara kelompok etnis di Yugoslavia dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. Program pertukaran kebudayaan di antara keenam republik semakin jarang dilakukan. Sekolah-sekolah dengan program nasional semakin terkikis dan tidak ada satupun universitas yang dibangun untuk semua etnis yang ada.⁶ Dengan demikian konsep bersatunya Yugoslavia semakin hilang didalam kehidupan antar etnis dan tradisi yang selama ini menyatukan Yugoslavia.

Aktor Intervensi Dalam Konflik Kosovo

Semenjak Serbia dipimpin oleh Slobodan Milosevic terjadi kerusuhan etnis, kerusuhan etnis memuncak ketika di sahkannya amandemen undang-undang dasar Republik Serbia, yang menyatakan bahwa otonomi Kosovo berada dibawah pengawasan pemerintah republik Serbia (Maret 1989). Padahal sebelum diubah berdasarkan konsitusi 1974 Serbia tidak mempunyai wewenang terhadap propinsi otonominya.

Tidak setujunya etnik Albania di Kosovo terhadap amandemen undang-undang dasar republik Serbia yang berisi mengenai otonomi Kosovo di bawah pengawasan pemerintah republik Serbia, dan etnis Albania baik kaum moderat maupun kaum radikal yang mengandalkan kekuatan bersenjata berpegang teguh pada cita-cita kemerdekaan Republik Kosovo. Dengan adanya keinginan etnis Albania untuk merdeka dan menjadikan Republik Kosovo sebagai negara yang berdaulat terpisah dari Serbia maka menimbulkan aksi ageresif Slobodan Milosevic menumpas

⁶. Richard West, *Tito and the Rise and Fall of Yugoslavia*, Carol and Graff, New York, 1995, hal. 220.

gerliawan dan mengusir etnik Albania dari kosovo, Milosevic menggelegar KLA (Tentara Pembebasan Kosovo) untuk memberantas kelompok separatis yang mengupayakan kemerdekaan kosovo. Sedangkan Serbia berpendapat Kosovo secara historis berada dalam kawasan dan sebagai bagian Serbia, dan bagi mereka UCK adalah kelompok teroris yang harus dihancurkan. Dengan adanya aksi berutal tersebut, mengakibatkan banyak korban berjatuh dari warga sipil Albania. Berdasarkan laporan pasukan Yugoslavia dan milisi Serbia sudah membantai ribuan warga sipil Albania di Kosovo, mereka juga membakar desa dan kota serta mengusir penduduknya.

Pembantaian etnis Albania oleh tentara-tentara Serbia di bawah komando Slobodan Milosevic mendapat aksi protes Amerika Serikat dan negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Ancaman Amerika Serikat dan NATO terhadap Presiden Serbia (Slobodan Milosevic) untuk menghentikan aksi pembantaian etnis Albania yang dilakukan oleh tentara-tentara Serbia tidak digubris oleh Slobodan Milosevic, tidak digubrisnya ancaman Amerika Serikat dan NATO oleh Slobodan Milosevic memaksa Amerika Serikat dan NATO melakukan invasi ke Serbia, dengan tujuan untuk menyelamatkan etnis Albania dan Kosovo dari pembantaian lebih lanjut tentara-tentara Serbia di bawah komando Slobodan Milosevic.

Dengan situasi yang tidak kondusif di wilayah Yugoslavia, PBB mengerahkan pasukan perdamaianya ke wilayah Yugoslavia untuk meredam konflik. Pengerahan pasukan oleh PBB ke wilayah Yugoslavia merupakan pengerahan pasukan terbesar dan terlama sepanjang sejarah penugasan pasukan PBB dalam misi internasionalnya guna menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Situasi ini merupakan momentum yang sangat baik bagi kegiatan PBB untuk kepentingannya terutama untuk mendapatkan bantuan dana dari masyarakat internasional. Tidak ketinggalan pula bagi NGO-NGO, krisis yang terjadi di wilayah eks. Yugoslavia merupakan ladang yang subur untuk berkiprah sesuai dengan kepentingannya baik dalam rangka kepentingan kemanusiaan ataupun yang lainnya sesuai dengan misi dari NGO yang bersangkutan. Akan tetapi tidak sedikit dari NGO tersebut justru banyak yang memperkeruh situasi di banding membantu penyelesaian masalah yang terjadi. Misalnya lewat NGO terjadi penyelundupan senjata atau personel NGO merangkap jadi agen intelejen pihak-pihak tertentu di wilayah Yugoslavia.

Latar Belakang Intervensi Kemanusiaan Dalam Konflik Kosovo

Konflik yang terjadi di Kosovo telah menjadi salah satu perhatian utama dunia internasional. Seperti yang telah dijelaskan diawal bahwa etnik Serbia yang dipimpin oleh Slobodan Milosevic berusaha untuk

menghalang halangi keinginan etnik Albania di Kosovo untuk mendirikan republik Kosovo yang lepas dari Serbia. Dengan mencabut hak otonomi Kosovo pada tahun 1989, dan berupaya untuk melenyapkan etnik Albania di Kosovo . Tindakannya itu telah mengakibatkan terjadinya tragedi kemanusiaan didaerah Balkan. Dengan politiknya di Kosovo yaitu 'pembersihan etnik' yang dilakukan secara bertahap, sistematis, dengan dibarengi strategi bumi hangus. Tentara Serbia menyerbu Kosovo dan membunuh penduduk sipil serta membumi hanguskan desa-desa disana.

Melihat kejadian tersebut mau tak mau membuat masyarakat internasional kembali berpikir untuk segera turun tangan. Terutama, ketika melihat besarnya jumlah korban yang menderita dan meninggal dunia, serta ketika negara yang seharusnya berkewajiban menangani masalah keamanan ternyata tak mampu, atau tak mau berbuat sesuatu. Negara Barat hanya melihat dari sudut pandanganya bahwa Kosovo hanyalah wilayah yang kecil, berpenduduk sedikit ,dan miskin. Pelajaran baru yang kita dapatkan, hanyalah bahwa masyarakat dunia tak bisa tinggal diam melihat pelanggaran HAM dilakukan secara terang- terangan dan sistematis. Kita juga kini tahu bahwa, bila ingin mendapatkan dukungan masyarakat dunia, intervensi harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip universal yaitu yang berpegang pada piagam PBB. Saat ini, kita akan tahu persis bahwa tujuan piagam itu melindungi hak-hak azasi manusia bukan pelanggar hak-hak azasi manusia.

Dalam hal ini, masalah intervensi kemanusiaan tidak dapat dianggap mudah atau begitu saja karena adanya kompleksitas didalamnya. Seperti halnya memastikan secara 'hitam-putih' siapa salah siapa benar dalam kasus begini. Yang mengintervensi akan membenarkan tidakannya dengan alasan kemanusiaan, sementara yang diintervensi akan mengecam si pengintervensi dengan alasan melanggar kedaulatan negara. Menurut futurology, batas-batas negara kelak makin kabur di masa mendatang, intervensi kemanusiaan justru akan mendapatkan pembenaran. Orang-orang akan menganggap " sah-sah saja" berbuat demikian. Hanya saja bukan berarti lalu tak ada lagi persoalan. Sebab, sangat mungkin intervensi semacam itu dijadikan kedok untuk memaksakan kepentingan negara tertentu.

Intervensi pihak luar yang terjadi di Kosovo sebagai bentuk kausalitas konflik yang terjadi di daerah tersebut pada awalnya dilakukan oleh negara negara Barat (Eropa) Tetapi Barat lebih berpihak kepada Serbia, beranggapan bahwa Kosovo harus tetap menjadi bagian Republik Federasi Yugoslavia dan mempercayai Serbia sebagai faktor stabilitas wilayah Balkan. Pendapat ini keliru karena Serbia melakukan tindakan yang malah memicu pertentangan semakin tajam. Konflik terus berkecamuk di Kosovo. Amerika yang mengaku sebagai polisi dunia dan berperan penting menjaga ketertiban dan keamanan dunia merasa terpanggil untuk

ikut campur menyelesaikan konflik yang terjadi. Salah satu niat baik yang diberikan Amerika dengan mengupayakan perdamaian melalui bentuk persetujuan konsep perdamaian yang dibawa oleh duta

perdamaian Amerika Serikat Richard Hoolbrooke. Dengan tujuan membujuk Presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic untuk menyetujui konsep perdamaian dengan etnik Albania di propinsi Kosovo, yang antara lain ditandai dengan pemberian otonomi penuh pada Kosovo dan kehadiran pasukan penjaga perdamaian Barat di propinsi ini. Ternyata upaya ini tidak direspon dengan baik oleh Milosevic.

Sejak berlangsung perundingan sebelumnya di Rambouillet, di luar kota Paris, AS dan negara-negara Pakta pertahanan Atlantik Utara NATO sudah memperingatkan Milosevic, dengan ultimatum kalau ia bersikeras tidak mau menyetujui konsep perdamaian yang ditawarkan, maka negara tersebut (Yugoslavia) akan diserang. Dan terbukti Milosevic tetap bersikukuh dengan pendiriannya tidak mengindahkan ancaman tersebut.

Akhirnya pada hari Rabu siang 24 Maret 1999, di ruang Ruang Oval Gedung Putih atas laporan Penasihat Keamanan Nasionalnya, Sandy Berger bahwa misi duta perdamaianya mengalami kegagalan dan permohonan persetujuan penyerangan atas Yugoslavia. Dengan tegas Bill Clinton menyatakan penyerangan terhadap Yugoslavia. Berger lalu kembali ke kantornya dan memanggil Jendral Hugh Shelton, Kepala Pimpinan Staf Gabungan, yang meneruskan keputusan presiden tersebut ke kantor Jendral Wesley Clark, Panglima tertinggi NATO di Brussels, Belgia.

Disini terlihat bahwa Amerika Serikat secara sepihak membuat keputusan penyerangan terhadap Serbia tanpa pertimbangan dan persetujuan Dewan Keamanan PBB, sebagai Badan Organisasi Internasional. Sekitar dua jam kemudian saat malam sudah turun di Pristina, ibu kota Kosovo terjadi beberapa kali ledakan, sejak itu Operasi Kekuatan Gabungan (Operation Allied Force)NATO mulai dilancarkan. Serangan udara yang dilancarkan NATO di Kosovo penuh dengan drama ,sangat menarik dari kaca mata kajian strategi dan politik, perang udara terbesar di Eropa sejak tahun 1945 dimulai. Dalam penyerbuannya ini AS mengerahkan hampir seluruh kekuatan persenjataannya termasuk juga rudal berpengarah laser dan persenjataan teknologi tinggi lainnya serta kekuatan udara berupa berbagai jenis pesawat perang.Guna ambil bagian dalam perang yang didalamnya terkandung kekejaman abad pertengahan. Dalam serangan ini pihak NATO menyatakan berupaya keras menghindari jatuhnya korban baik warga sipil maupun bangunan sipil.

Meski NATO dalam Operasi Allied Force sudah mengerahkan kekuatan udaranya yang spektakuler, tetapi Presiden Milosevic masih sanggup bertahan, bahkan sebenarnya sempat ngotot. Sepekan setelah serangan NATO, aksi Milosevic menumpas gerilyawan dan mengusir etnik Albania dari Kosovo masih terus mengencar. Oleh KLA (Tentara Pembebasan Kosovo), kelompok separatis yang mengupayakan kemerdekaan Kosovo, pasukan Yugo dan milisi Serbia dilaporkan sudah membantai ribuan warga sipil Albania di Kosovo. Mereka juga membakar desa dan kota, serta mengusir penduduknya.

Atas aksi tersebut, gelombang pengungsi yang berjumlah ratusan ribu, mengalir membanjiri negara disekitar Yugo, seperti Albania, Macedonia, dan Turki. Tragedi kemanusiaan di Kosovo ini sempat disebut sebagai bencana paling besar yang terjadi di Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia II. Dengan latar belakang seperti itu, NATO bertekad melanjutkan serangan udara hingga Presiden Milosevic bersedia menandatangani perjanjian Rambouillet.

Setelah persetujuan dicapai antara NATO dan Yugoslavia, pengungsi Kosovo etnik Albania segera bergegas kembali ke kampung halaman, dan tentara Serbia yang dikirim ke Kosovo pun juga kembali ke daerah asalnya (meski pada sebagian waktu kemarin mereka harus sembunyi dari gempuran serangan udara NATO), semua bisa melihat kehancuran yang ada. Selain sasaran militer, bom-bom NATO juga menghancurkan prasarana sipil seperti jembatan, juga pabrik dan fasilitas umum. Setelah Milosevic menyerah dan Kosovo diberikan di bawah pengawasan internasional.

Sekilas membaca penjelasan diatas mengenai intervensi kemanusiaan di Kosvo, dapat diambil pemahaman bahwa, campur tangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Sekutunya yang tergabung dalam Pakta Pertahanan NATO adalah dalam bentuk Intervensi Kekuatan Bersenjata.

Alasan Diberlakukannya Intervensi Kemanusiaan Di Kosovo

Masalah intervensi kemanusiaan hingga kini masih menjadi perdebatan di kalangan dunia internasional, karena sampai saat ini tidak ada aturan yang sifatnya mengikat dan berlaku universal mengenai intervensi kemanusiaan. Perbedaan persepsi tentang siapa, bagaimana dan siapa yang harus mengambil inisiatif melakukan intervensi kemanusiaan, selalu menjadi masalah bagi negara-negara yang ingin melakukan intervensi. Ditambah lagi, banyak komentar bahwa intervensi yang terjadi saat ini sarat dengan kandungan kepentingan nasional negara pelaku intervensi. Hal itu pula yang terjadi dalam kasus Kosovo. Intervensi yang dilakukan oleh (North Atlantic Treaty Organization) NATO, meskipun tema besarnya adalah untuk menghentikan konflik dan memaksa Yugoslavia menerima status otonomi khusus bagi propinsi Kosovo, namun pada kenyataannya intervensi yang dilakukan juga sarat dengan kepentingan nasional negara anggota NATO. Adapun kepentingan itu meliputi :

1. Kepentingan politik

Tujuan keterlibatan Amerika Serikat dalam kasus Kosovo didasari oleh upaya untuk menghentikan secara penuh peran Rusia sebagai penguasa di kawasan Eropa Timur serta sebagai *superpower* terhadap kepentingan-kepentingan global. Dengan makin banyaknya negara di kawasan tersebut yang menjadi atau setidaknya mengajukan diri sebagai anggota NATO, mampu memutuskan ikatan yang secara tradisional telah dijalin oleh Rusia dengan negara kawasan Eropa Timur.

Selain itu, isu pemberian bantuan ekonomi kepada negara yang mengalami konflik guna memperbaiki situasi dalam negeri juga menjadi alat penekan bagi AS untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Untuk mendapatkan kucuran dana, maka wilayah yang menjadi tempat konflik harus melakukan kerja sama dengan pengadilan internasional kejahatan perang, dimana mereka harus menyerahkan penjahat perang agar dapat diadili. Upaya ini secara terselubung dimaksudkan untuk memperluas pengaruh AS dan memaksa negara penerima bantuan untuk menuruti keinginan AS.

Di sisi lain, posisi Kosovo yang berada ditengah-tengah wilayah Republik Federal Yugoslavia juga membuat daerah ini memiliki arti khusus bagi AS dan NATO dalam hal pengawasan Semenanjung Balkan. Kehadiran pasukan NATO dibawah pimpinan AS dengan memasang pasak ditengah-tengah Balkan membuat AS dan NATO memiliki batu loncatan untuk menguasai atau masuk ke akses-akses selanjutnya di kawasan Balkan bagian timur dan utara. Selain itu juga alasan keterlibatan NATO dalam intervensi ini sebagai upaya mencegah munculnya makin meningkatnya semangat solidaritas etnik Albania yang dikhawatirkan akan memunculkan skenario Albania Raya..

Bagi Perancis dan Inggris dengan adanya konflik Kosovo akan mengganggu upaya mereka membangun pasukan militer teras eropa yang dikemudian hari bisa mengatasi konflik-konflik yang menimpa Eropa tanpa harus melibatkan NATO. Jadi keterlibatan mereka dalam intervensi secara spesifik adalah untuk mengkondisikan Eropa dalam situasi damai sehingga pembentukan pasukan teras militer Eropa bisa cepat diwujudkan.

2. Kepentingan militer

Kepentingan negara-negara barat yang tergabung dalam NATO juga meliputi kepentingan militer. Adapun tujuan ini untuk menghentikan laju produk-produk industri militer negara Balkan yang mengancam produk negara-negara barat. Selain itu, konflik Kosovo juga menjadi ajang pembuangan senjata-senjata dan amunisi serta peralatan militer pihak barat yang seharusnya dihancurkan dengan biaya yang sangat mahal namun sebaliknya mendapat keuntungan besar, karena tidak harus menghancurkannya tapi bisa dilempar guna mempersenjatai kelompok-kelompok pemberontak di kosovo. Selain itu, kosovo juga menjadi ajang transaksi bisnis senjata produk-produk negara barat serta menjadi ajang uji coba bagi penemuan-penemuan senjata-senjata dan perlengkapan militer barat baik secara langsung maupun tidak langsung.

3. Kepentingan ekonomi

Kawasan Balkan juga memiliki arti penting bagi Jerman, terutama untuk pelemparan hasil-hasil produksi industri jerman, untuk mendapatkan sumber bahan baku serta kemungkinan pelemparan sampah-sampah nuklir serta jalur menuju negara-negara sumber minyak di laut tengah.dengan menciptakan wilayah Balkan yang aman setidaknya dapat mempermudah upaya jerman untuk mencapai tujuannya tersebut.

Dampak Konflik Kosovo Pra Dan Paska Intervensi

Sebelum intervensi kemanusiaan dilakukan di Kosovo,kondisi kosovo sangat memprihatinkan. Dalam konflik tersebut diperkirakan hampir 10.000 orang tewas dan lebih dari 22.000 orang menjadi pengungsi.

Pasca intervensi, kerusakan yang diderita Serbia tidak hanya terbatas pada hal fisik, tetapi juga mental. Secara fisik, banyak bangunan dan kota-kota di Serbia yang hancur, baik bangunan sipil maupun instansi militer. Selain itu jumlah korban yang jatuhpun tidak hanya terbatas pada kalangan

sipil, akibat serangan udara NATO, banyak kalangan sipil yang menjadi korban. Dampak lain yang hingga sekarang menghantui adalah radiasi. Hal itu disebabkan oleh penggunaan depleted uranium (DU) dalam peralatan atau persenjataan perang yang digunakan oleh pasukan NATO dalam konflik Kosovo.

Menurut laporan Organisasi Kesehatan Dunia, tingkat radioaktif di wilayah-wilayah yang digempur NATO mencapai 1.100 kali dari tingkat normal. Selain itu, dilaporkan pula banyak pasukan NATO yang terserang leukemia dan banyak penduduk Kosovo yang juga harus menanggung penderitaan seumur hidup karena terkena efek radioaktif senjata NATO.

Kesimpulan

Keberadaan intervensi kemanusiaan dalam upaya penyelesaian konflik masih menjadi sesuatu yang tidak mungkin terlepas dari kepentingan aktor pelaku intervensi. Keterlibatan NATO dan negara-negara anggotanya dalam menyelesaikan konflik Kosovo lebih banyak mempergunakan jalan kekerasan, karena menurut mereka cara-cara damai hanya akan menghabiskan waktu dan memberi kesempatan bagi Serbia untuk melakukan tawar-menawar. Jika itu dilakukan sama saja menunjukkan kelemahan NATO yang dalam situasi ini seharusnya bertindak sebagai pemegang kendali.

NATO juga merasa berhak untuk melakukan intervensi dalam konflik Kosovo, karena di Kosovo dapat dikatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat dimana terdapat usaha pemusnahan etnis Albania atas etnis Serbia yang secara tidak langsung dikomandoi oleh Slobodan Milosevic.

Amerika Serikat yang tergabung dalam NATO dan mengikuti Operasi Allied Force pun mempunyai kepentingan tersendiri dalam intervensi tersebut, yaitu ingin mendapatkan simpati dan berusaha membendung hegemoni Rusia yang cukup berpengaruh juga di kawasan Eropa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- , Laporan Tahunan KBRI di Beograd II 1989/1990.
- , Ensiklopedi Indonesia Suplemen 1990, Pt. Lehtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta 1990.
- West, Richard, **Tito and the Rise and Fall of Yugoslavia**, Carol and Graff, New York, 1995.
- , **Dari konflik pasca Perang Dingin : Studi Kasus Yugoslavia**, Laporan Penelitian FISIP UGM Yogyakarta, 1996.
- , Laporan Tahunan KBRI di Beograd II 1989/1990.
- , **Karena Milosevic Bandel, Pecah Perang Udara Terbesar di Eropa Sejak 1945**, dalam <http://www.angkasa-online.com/09/08/utama/utama1.htm>, diakses pada tanggal 5 November 2005
- , **Konflik Kosovo dan Kekuatan Udara**, dalam <http://www.angkasa-online.com/09/10/opini/opini1.htm>, diakses pada tanggal 5 November 2005.
- , **Milosevic dan Mimpi Serbia Raya**, dalam <http://www.indonesia.com/intisari/1999/Juni/milosevic.htm>, diakses pada tanggal 6 November 2005.
- Toruan, MM, Kol.Chb.Drs.T.Samuel L, **Balkanisasi Korban Perang Modern, apakah menimpa NKRI?**, dalam <http://www.mabesad.mil.id/artikel/artikel5/balkanisasi1.htm>, diakses pada tanggal 7 November 2005.
- , Sejarah Yugoslavia, dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Yugoslavia, diakses pada tanggal 7 November 2005.
- , **Kofi Annan : Dilema Intervensi Kemanusiaan**, dalam <http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind9909d&L=indonews&O=D&F=&S=&P=13907>, diakses pada tanggal 8 November 2005.
- , **Era Usang Kepentingan Nasional**, dalam <http://www.listserv.dfn.de/cgi-bin/wa?A2=ind0001a&L=indonews&O=D&F=&S=&P=9429>, diakses pada tanggal 8 November 2005.
- , **Krisis Balkan: Ambisi Amerika Serikat, Derita Kaum Muslim**, dalam <http://www.angelfire.com/de/assalam/asalam049.html>, diakses pada tanggal 8 November 2005.
- , **Satu Bulan Perang Balkan : Sebuah Neraca Keadaan**, dalam <http://www.wsws.org/>, diakses pada tanggal 8 November 2005.